

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk mendukung meningkatnya taraf hidup penduduk negara yang dilakukan dengan terencana, sadar, serta berkelanjutan untuk mencapai kondisi lebih baik lagi.² Pembangunan ekonomi pada daerah merupakan tahapan pada saat pemerintah daerah dan juga masyarakatnya saling membantu dalam mengurus sumber daya guna mengembangkan urusan ekonomi wilayahnya. Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur yang penting dalam mengukur kesuksesan dalam pembangunan yang sudah diraih, serta untuk menentukan kemana maksud pembangunan pada masa depan.³ Pertumbuhan ekonomi menjelaskan pada sejauh mana kegiatan ekonomi akan mampu mewujudkan pendapatan masyarakat pada waktu-waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu negara karena mencerminkan kapasitas suatu perekonomian dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Peningkatan ini terjadi ketika terdapat akumulasi modal yang memadai, baik dalam bentuk investasi fisik seperti infrastruktur dan peralatan produksi, maupun investasi finansial yang memperkuat sektor usaha. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikembangkan oleh para ekonom seperti

² Ayu Noviatamara, Tiffany Ardina, and Nurisqi Amalia, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 1 (2019): 53–60.

³ Elly Suryani, "Analisis Total Faktor Produktivitas Dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 4, no. 2 (2006): 93–105.

Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus. Teori ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi melalui akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal dan spesialisasi kerja yang meningkatkan produktivitas. David Ricardo menyoroti pentingnya akumulasi modal dan pertumbuhan penduduk, namun ia juga memperingatkan tentang hukum hasil yang semakin berkurang. Sementara itu, Malthus mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena sumber daya alam yang terbatas.⁴

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik oleh ekonom seperti Robert Solow dan Trevor Swan. Model Solow-Swan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam model ini, kemajuan teknologi dianggap sebagai faktor eksogen yang meningkatkan produktivitas total faktor. Teori ini juga mengasumsikan adanya pengembalian skala yang menurun terhadap modal dan tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi akan mencapai kondisi *steady-state* jika tidak ada kemajuan teknologi. Secara makro, semakin tinggi nilai PDRB yang didapatkan, semakin tinggi pula kapasitas yang dimiliki daerah untuk menggali potensi yang ada. Penerimaan daerah yang meningkat akan berimplikasi pada harapan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan

⁴ Yadiansya, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Propinsi Di Indonesia Periode 1993-2005," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5, no. 1 (2007).

publik. Dengan produktivitas masyarakat pada sektor perekonomian yang terus bertumbuh, keadaan ini pada akhirnya akan memberikan multiplier effect untuk pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui produk domestik regional bruto.⁵ Berikut data laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir (2019–2023):

Tabel 1.1
Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019-2023⁶

Tahun	Produk Domestik Bruto (%)
2019	5,02
2020	-2,07
2021	3,69
2022	5,31
2023	5,05

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dilihat pada tabel 1.1 selama periode 2019–2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan dinamika yang kuat dan responsif terhadap kondisi global. Tahun 2019 mencatat pertumbuhan stabil sebesar 5,02%, mencerminkan kondisi ekonomi yang normal sebelum pandemi. Namun pada 2020, ekonomi berkontraksi tajam sebesar -2,07% akibat dampak pandemi COVID-19 yang menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi. Pemulihan mulai terlihat pada 2021 dengan pertumbuhan 3,69%, didorong oleh pelonggaran pembatasan sosial dan pemulihan aktivitas produksi serta konsumsi. Momentum pemulihan semakin kuat pada 2022, dengan pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir sebesar 5,31%, didukung oleh ekspor komoditas dan investasi. Pada 2023, pertumbuhan

⁵ Hasna Imtiyaz Hanifah dan Agus Sunarya Sulaeman, *Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah: Studi Empiris Atas Korelasi Resiprokal*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol. 5 No. 2 (2022)

⁶ Badan Pusat Statistik, “Laju Pertumbuhan Ekonomi,”

tetap stabil di angka 5,05%, menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mempertahankan pemulihan ekonomi secara konsisten pasca-pandemi, meskipun menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik dan tekanan inflasi.

Kebijakan pemerintah sangat menentukan arah dan kekuatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui pengaruhnya terhadap dua faktor utama produksi yaitu modal dan tenaga kerja. Pertama, dalam hal modal, kebijakan pemerintah yang mendorong investasi infrastruktur, kemudahan berusaha, dan stabilitas makroekonomi berperan langsung dalam meningkatkan akumulasi modal fisik. Contohnya, pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri memperkuat kapasitas produksi nasional dan menurunkan biaya logistik.⁷ Selain itu, insentif fiskal dan reformasi regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi investasi swasta, baik domestik maupun asing.⁸ Kedua, dari sisi tenaga kerja, kebijakan pendidikan, pelatihan vokasi, serta kesehatan masyarakat meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam jangka panjang. Program seperti Prakerja, revitalisasi SMK, dan peningkatan akses layanan kesehatan dasar merupakan contoh konkret investasi sumber daya manusia oleh pemerintah. Dengan meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kerja, serta memperbesar stok modal melalui kebijakan yang tepat, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi

⁷ Lukman Hakim Piliang, "Public Administration Journal Vol. 8 No. 1 (2024) UMKM PENGGERAK RODA PEREKONOMIAN NASIONAL" 8, no. 1 (2024): 1–8.

⁸ World Bank, *Indonesia Economic Prospects: Boosting the Recovery* (2021)

berkelanjutan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi nasional di masa depan.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor makroekonomi, seperti konsumsi, investasi, perdagangan, dan pengeluaran pemerintah, serta oleh faktor-faktor struktural seperti kualitas sumber daya manusia, efisiensi birokrasi, dan perkembangan sistem keuangan. Salah satu aspek yang kini semakin mendapat perhatian dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia adalah peran sistem keuangan syariah, khususnya pembiayaan bank syariah. Bank syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan. Sistem ini berbeda dari perbankan konvensional karena tidak mengenal bunga (riba) dan lebih mengedepankan pembagian risiko serta hasil (*profit and loss sharing*).⁹

Perbankan konvensional di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak masa kolonial, dimulai dengan pendirian De Javasche Bank pada tahun 1828. Setelah kemerdekaan, bank ini dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951. Perkembangan sektor ini semakin pesat dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 10 Tahun 1998, memberikan kerangka hukum yang lebih fleksibel bagi perbankan nasional. Namun, kemunculan perusahaan berbasis teknologi informasi (*fintech*) sejak tahun 2016 telah memengaruhi kinerja keuangan bank umum

⁹ Salahuddin El Ayyubi, Lukytawati Anggraeni, and Almira Dyah Mahiswari, "Pengaruh Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Al-Muzara'ah* 5, no. 3 (2020): 88–106, <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.88-106>.

konvensional, menuntut adaptasi terhadap layanan digital untuk mempertahankan daya saing.¹⁰ Hingga Desember 2024, sektor perbankan konvensional di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan nasional mencapai Rp10.000 triliun, meningkat sekitar 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 4,5%, mencapai Rp7.500 triliun, sementara kredit yang disalurkan meningkat 6% menjadi Rp6.800 triliun. Pertumbuhan ini didukung oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan peningkatan aktivitas sektor riil. Dari sisi kelembagaan, terdapat 105 bank umum konvensional yang terdiri dari 4 bank persero, 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD), 67 bank swasta nasional, dan 7 kantor cabang bank asing. Meskipun jumlah bank konvensional lebih banyak dibandingkan bank syariah, persaingan dengan lembaga keuangan berbasis teknologi (*fintech*) menuntut bank konvensional untuk terus berinovasi dalam layanan digital dan efisiensi operasional.¹¹

Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, sebagai hasil inisiatif Majelis Ulama Indonesia. Pertumbuhan sektor ini didukung oleh regulasi seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum bagi operasional bank syariah. Meskipun demikian, perbankan syariah menghadapi tantangan seperti

¹⁰ Yuyun Yuniasih dan Mira Rahmawati Dedeh Sri Sudaryanti, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Sebelum Dan Sesudah Beroperasinya Perusahaan Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Ekonomi Manajemen* 8, no. 1 (2022).

¹¹ Alfi Syahrani dan Asri Nur Wahyuni, "Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Umum Konvensional Dan Perbankan Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK," *Jurnal Magisma* XII, no. 2 (2024).

keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya inovasi produk, dan rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Selain itu, perbedaan pemahaman fiqh muamalah juga menjadi hambatan dalam standarisasi produk secara nasional dan global.¹²

Perbankan syariah di Indonesia mencatat pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2024. Menurut OJK, total aset perbankan syariah mencapai Rp980,30 triliun, tumbuh 9,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangsa pasar perbankan syariah meningkat menjadi 7,72% dari total aset industri perbankan nasional. Penyaluran pembiayaan mencapai Rp643,55 triliun, tumbuh 9,92%, dan DPK yang dihimpun sebesar Rp753,60 triliun, tumbuh sekitar 10%. Jumlah lembaga perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data Februari 2024, terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS), total 33 bank syariah. Pertumbuhan ini didorong oleh kebijakan spin-off yang mendorong pemisahan UUS dari bank induk konvensional, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah.¹³

Dengan berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia, menarik untuk dikaji lebih lanjut sejauh mana pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah mampu mendorong aktivitas ekonomi, terutama di sektor riil, terutama dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui berbagai produk pembiayaan seperti akad murabahah

¹² Abdul Rachman, "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022).

¹³ Siti Elita dan Anisatul Kamilah Ely Eka Saputri, "Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Melaksanakan Spin Off Pada Unit Usaha Syariah," *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (JIESA)* 1, no. 4 (2024).

(jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan), bank syariah membantu UMKM untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.¹⁴ Prinsip utama ekonomi syariah adalah keadilan (al-adl) dan kemitraan (al-musyarakah). Prinsip keadilan menuntut adanya distribusi sumber daya dan kekayaan yang merata, transparansi dalam transaksi, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang lebih lemah dalam kegiatan ekonomi. Sementara itu, prinsip kemitraan menekankan pentingnya kerjasama yang saling menguntungkan, di mana semua pihak berbagi risiko dan hasil usaha secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pembiayaan syariah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan adil. Kontribusi bank syariah dalam mendukung sektor riil dan UMKM turut memperkuat ketahanan ekonomi nasional, sekaligus memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.¹⁵ Berikut tabel data jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia tahun 2019–2023:

¹⁴ Rendi Renaldi, Slamet Karmawan, and Keberadaan Lembaga, “Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Keuangan Yang Berlandaskan Keadilan , Kemanfaatan (Maslahat),” 3, no. 2 (2024): 102–14.

¹⁵ Ahmad Hamid et al., “Peran Produk Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Perkembangan Dunia Usaha Umkm Di Kota Kendari,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 112–21.

Tabel 1.2
Data Jumlah Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Bank Syariah Di
Indonesia Tahun 2019–2023¹⁶

Tahun	Total Pembiayaan UMKM (Rp Triliun)	Persentase terhadap Total Pembiayaan Syariah (%)
2019	106,1	19,9
2020	114,4	20,3
2021	123,5	21,1
2022	135,7	22,4
2023	147,3	23,6

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2023

Jika dilihat pada tabel 1.2 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam pembiayaan UMKM oleh bank syariah di Indonesia selama periode 2019–2023. Total pembiayaan UMKM meningkat dari Rp 106,1 triliun pada 2019 menjadi Rp 147,3 triliun pada 2023, dengan persentase terhadap total pembiayaan syariah juga mengalami kenaikan dari 19,9% menjadi 23,6%. Hal ini mencerminkan komitmen bank syariah dalam mendukung sektor produktif dan riil, khususnya UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Peningkatan ini juga menunjukkan efektivitas bank syariah dalam memperluas inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*), pendidikan merupakan investasi penting yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan efisiensi kerja.¹⁷ Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan inovatif, untuk pertumbuhan ekonomi

¹⁶ Statistik Perbankan Syariah, OJK.

¹⁷ Amriuddin Idris, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta, Sleman: Depublish, 2018).

jangka panjang. Serta mendorong peningkatan efisiensi dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan teknologi.¹⁸ Dengan begitu, peningkatan angka partisipasi sekolah dan pengurangan angka putus sekolah sangat krusial untuk memperkuat modal manusia yang menjadi fondasi utama produktivitas dan perkembangan ekonomi suatu negara.

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi secara langsung meningkatkan produktivitas ekonomi karena pendidikan memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan berpikir kritis. SDM yang berkualitas lebih efisien dan inovatif dalam bekerja, mampu mengadopsi teknologi baru, serta berkontribusi pada peningkatan output dan daya saing ekonomi. Pendidikan memainkan peranan utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menciptakan pengetahuan baru, menyerap teknologi modern, melahirkan tenaga-tenaga ahli serta mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Teori yang berkaitan dengan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi adalah Teori Modal Manusia. Dalam teori ini menyebutkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila seseorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, dan lamanya dalam menempuh pendidikan akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan pendidikannya yang lebih rendah. Apabila upah pekerja mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak penduduk yang

¹⁸ Nugroho SBM, "Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Media Ekonomi Dan Manajemen* 29, no. 2 (2014AD): 195–202.

memiliki pendidikan tinggi, maka semakin tinggi produktivitas dan ekonomi nasional akan tumbuh dengan baik.¹⁹ Oleh karena itu, meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah sangat penting untuk memperluas basis tenaga kerja terampil, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi negara. Berikut data IPM Indonesia yang menunjukkan tingkat pendidikan dan kesehatan di berbagai daerah selama periode 2019–2023:

Tabel 1.3
Data IPM Indonesia Periode 2019–2023 Per Provinsi²⁰

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
DKI Jakarta	80,76	81,13	81,49	81,85	82,46
DI Yogyakarta	79,95	80,34	80,72	81,10	81,49
Jawa Barat	72,61	72,96	73,30	73,64	73,98
Jawa Tengah	71,88	72,17	72,50	72,83	73,17
Jawa Timur	71,47	71,77	72,10	72,43	72,77
Banten	73,16	73,51	73,85	74,19	74,53
Bali	76,96	77,31	77,66	78,01	78,36
Nusa Tenggara Barat	67,89	68,23	68,56	68,90	69,23
Nusa Tenggara Timur	65,43	65,76	66,09	66,42	66,75
Kalimantan Barat	71,91	72,23	72,56	72,89	73,22
Kalimantan Tengah	70,92	71,24	71,57	71,90	72,23
Kalimantan Selatan	73,15	73,50	73,84	74,18	74,52
Kalimantan Utara	71,44	71,77	72,10	72,43	72,76
Sulawesi Utara	70,47	70,80	71,13	71,46	71,79
Sulawesi Tengah	66,89	67,22	67,55	67,88	68,21
Sulawesi Selatan	70,77	71,10	71,43	71,76	72,09
Sulawesi Tenggara	66,52	66,85	67,18	67,51	67,84
Gorontalo	66,22	66,55	66,88	67,21	67,54
Maluku	67,73	68,06	68,39	68,72	69,05
Maluku Utara	66,57	66,90	67,23	67,56	67,89
Papua	60,84	61,17	61,50	61,83	62,16
Papua Barat	62,07	62,40	62,73	63,06	63,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019-2023

¹⁹ M. Riadhos Solichin, *Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Perekonomian Kabupaten Mojokerto*, IKIP Widya Darma Surabaya Vol. 2 No. 7 (2019)

²⁰ Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2019–2023

Dilihat pada tabel 1.3 Provinsi dengan IPM tinggi seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, provinsi dengan IPM lebih rendah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas SDM, yang berdampak pada keterbatasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Provinsi-provinsi dengan IPM tinggi seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali umumnya menunjukkan tingkat pendidikan yang lebih baik, harapan hidup yang lebih tinggi, serta pendapatan per kapita yang relatif besar. Hal ini menciptakan sumber daya manusia yang lebih produktif, inovatif, dan kompetitif, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi dan daya saing industri. Sebaliknya, daerah dengan IPM rendah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur masih menghadapi tantangan serius dalam akses pendidikan dan kesehatan, yang berkontribusi pada rendahnya produktivitas tenaga kerja dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah, menciptakan tenaga kerja yang unggul, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Peningkatan investasi, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, manufaktur, energi, dan teknologi, merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Investasi memberikan efek langsung terhadap peningkatan kapasitas produksi nasional, penciptaan nilai tambah, serta penyerapan tenaga kerja dalam skala besar. Sektor strategis dipilih karena memiliki efek berantai (*multiplier effect*) yang tinggi terhadap sektor lainnya. Misalnya, investasi di sektor konstruksi dan infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas wilayah, menurunkan biaya logistik, serta memudahkan distribusi barang dan jasa, sehingga menciptakan ekosistem yang kondusif untuk aktivitas ekonomi yang lebih luas.²¹

Di tingkat nasional, data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi pada 2023 mencapai Rp1.418 triliun, naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan kontribusi besar dari sektor industri logam dasar, energi, transportasi, dan telekomunikasi. Hal ini tidak hanya menandakan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia, tetapi juga menciptakan jutaan lapangan kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung. Tenaga kerja terserap di berbagai tingkatan keterampilan, mulai dari buruh kasar hingga tenaga ahli, yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan masuknya investasi asing langsung (FDI), terjadi transfer teknologi dan

²¹ Cici Kurnia Sari Lubis, "Pengaruh Jumlah Perusahaan Industri Skala Kecil, Investasi PMDN Dan Nilai Output Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Skala Kecil Di Indonesia," *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2025).

peningkatan kapasitas SDM lokal melalui pelatihan dan kolaborasi industri.²²

Investasi strategis juga mendorong transformasi struktural ekonomi dari sektor informal dan padat karya ke sektor formal dan berbasis teknologi. Contohnya, masuknya investasi di sektor digital dan manufaktur modern menciptakan permintaan tinggi terhadap tenaga kerja terampil di bidang teknik, informatika, dan manajemen industri. Proses ini secara bertahap mengurangi ketergantungan pada sektor primer dan informal yang cenderung memiliki produktivitas rendah. Dengan demikian, arah pembangunan ekonomi menjadi lebih berorientasi pada produktivitas dan daya saing global, bukan hanya pertumbuhan nominal. Namun, untuk mengoptimalkan dampak investasi terhadap ekonomi dan ketenagakerjaan, dibutuhkan kebijakan yang mendorong kemudahan berusaha, stabilitas hukum, insentif fiskal yang tepat sasaran, dan dukungan infrastruktur yang merata. Jika tidak, investasi cenderung terpusat di wilayah tertentu seperti Jawa dan Sumatera, dan meninggalkan kawasan Indonesia Timur. Pemerintah juga perlu memperkuat ekosistem pendukung seperti pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan inkubator bisnis untuk memastikan bahwa investasi benar-benar membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal.²³ Berikut data realisasi investasi PMA dan PMDN selama periode 2020–2023 investasi asing dan domestik:

²² Handayani, “Dampak Investasi Asing Terhadap Perekonomian Nasional: Studi Sektor Industri Strategis,” *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Bisnis* 6, no. 3 (2021).

²³ Amalia, “Transformasi Ekonomi Melalui Investasi Strategis: Studi Kasus Sektor Teknologi Di Indonesia,” *Jurnal Teknologi Dan Ekonomi Digital* 4, no. 1 (2022).

Tabel 1.4
Data Realisasi Investasi PMA Dan PMDN Selama Periode 2020–2023²⁴

Tahun	PMDN (Rp Triliun)	PMA (Rp Triliun)	Total Investasi (Rp Triliun)
2020	413,5	412,8	826,3
2021	447,0	454,0	901,0
2022	552,8	654,4	1.207,2
2023	674,9	744,0	1.418,9

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, 2024

Jika dilihat pada tabel 1.4 peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun asing, telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Investasi tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi nasional tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, dan memperkuat infrastruktur ekonomi. Menurut data dari Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi pada tahun 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan investasi ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di atas 5% per tahun.

Peningkatan investasi di Indonesia selama periode 2020–2023 menunjukkan tren positif yang signifikan. Investasi ini telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor-sektor strategis. Untuk memaksimalkan manfaat investasi, diperlukan kebijakan yang mendukung iklim investasi yang

²⁴ Satu Data Kemendag, Investasi PMA pada <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-dalam-negeri/investasi-pma>

kondusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia.

Belanja pemerintah juga merupakan instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi negara. Dalam pandangan ekonomi Keynesian, belanja pemerintah memiliki efek multiplier, yakni setiap dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mendorong peningkatan output ekonomi secara berlipat. Belanja pemerintah yang tepat sasaran dapat meningkatkan permintaan agregat, memperkuat daya beli masyarakat, dan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian.²⁵

Alokasi belanja pemerintah pada sektor infrastruktur dan program sosial memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi dalam infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, dan mendorong aktivitas ekonomi lokal. Sebagai contoh, alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp423,4 triliun dalam APBN 2024 ditujukan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.²⁶ Sementara itu, program sosial seperti bantuan langsung tunai, subsidi kesehatan, dan pendidikan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Belanja bantuan sosial telah terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, menunjukkan bahwa

²⁵ Enny Eko Supriyanto, "Efektivitas Belanja Negara Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi," Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, n.d.

²⁶ "Optimalisasi Belanja Negara Untuk Mendorong Transformasi Ekonomi Di Tengah Tantangan Global," Kementerian Keuangan, APBN 2024, n.d., <https://anggaran.kemenkeu.go.id>.

peningkatan alokasi pada program sosial dapat membantu mengurangi kemiskinan.²⁷

Namun, efektivitas alokasi belanja tersebut sangat bergantung pada perencanaan dan implementasi yang tepat sasaran. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan infrastruktur, misalnya, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa daerah, seperti Kabupaten Aceh Tamiang . Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang tepat dalam sektor-sektor tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.²⁸ Secara keseluruhan, alokasi belanja pemerintah yang strategis pada infrastruktur dan program sosial dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Namun, diperlukan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif untuk memastikan bahwa investasi tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut tabel data alokasi belanja pemerintah untuk infrastruktur dan sosial dari APBN 2020–2024:

Tabel 1.5
Alokasi Belanja Pemerintah Untuk Infrastruktur Dan Sosial Dari APBN 2020–2024

Tahun	Infrastruktur (Rp Triliun)	Program Sosial (Rp Triliun)
2020	419,2	203,9
2021	417,4	408,8
2022	384,8	427,5

²⁷ Bustan Ramli dan Aulia Rahman Bato Pausan, “Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kemiskinan Di Indonesia,” *BEST* 4, no. 3 (2024).

²⁸ Adelia Putri dan Nurlaila Hanum Asnidar, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia,” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 3, no. 1 (2025).

Lanjutan tabel

Tahun	Infrastruktur (Rp Triliun)	Program Sosial (Rp Triliun)
2023	392,0	332,0-349,0
2024	423,4	493,5

Sumber: Kementerian Keuangan, APBN 2020–2024

Jika dilihat pada tabel 1.5 alokasi belanja pemerintah 2020–2024 menunjukkan peningkatan signifikan pada belanja sosial, dari Rp203,9 triliun (2020) menjadi Rp493,5 triliun (2024), mencerminkan upaya pemerintah menjaga daya beli dan mengurangi kemiskinan pasca-pandemi. Sementara itu, belanja infrastruktur tetap stabil di kisaran Rp380–423 triliun, menandakan fokus pada pembangunan jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsistensi belanja ini berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas sosial, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi kebijakan yang tepat sasaran.

Selama periode 2020–2024, alokasi belanja pemerintah Indonesia pada sektor infrastruktur dan program sosial telah berperan signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Investasi dalam infrastruktur meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi, sementara program sosial membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Kombinasi kebijakan fiskal yang tepat dan alokasi anggaran yang strategis telah memungkinkan Indonesia untuk pulih dari dampak pandemi dan melanjutkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Nabilah Huwaida, Ufairroh dan Rofiul Wahyudi yang menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi. Realisasinya terjadi saat pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*) meningkat maka pembiayaan Bank syariah pun akan meningkat. Dengan meningkatnya pembiayaan Bank Syariah, sumber modal dan aktifitas ekonomi akan meningkat melalui UMKM.²⁹Selain itu Fadly, dkk menemukan bahwa sebagai ikhtiar mereduksi kemiskinan di Kota Ternate, studi ini memberikan catatan bahwa penting bagi bank syariah untuk meningkatkan dana pihak ketiga agar pembiayaan perbankan syariah kepada kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan dapat diperluas dan selanjutnya menjangkau kelompok rentan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan. Di samping itu, desain hingga implementasi belanja pemerintah yang bersifat *pro-poor* harus diaplikasikan secara konsisten, karena hal ini juga akan membawa dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas: merepresentasikan keberpihakan pada kaum miskin dan berkelanjutan.³⁰

Meneliti pengaruh keempat variabel ini secara simultan sangat penting dalam konteks Indonesia karena masing-masing variabel tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Misalnya, investasi dapat mendukung sektor pendidikan melalui pengembangan pelatihan tenaga kerja, sementara belanja pemerintah bisa

²⁹ Nabilah Huwaida, Ufairroh Ufairroh, and Rofiul Wahyudi, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2016–2020," *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 18, no. 1 (2023): 1–12.

³⁰ Fadly, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Ternate," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021).

diarahkan untuk memperkuat pembiayaan bank syariah dan meningkatkan akses pendidikan. Dengan menganalisis keempat variabel ini secara bersama-sama, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang lebih terintegrasi dan efektif.

Berdasar pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Tingkat Pendidikan, Investasi, Dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”**

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini menghadapi beberapa permasalahan utama, seperti efektivitas penggunaan anggaran pemerintah dalam sektor infrastruktur dan program sosial yang belum sepenuhnya terukur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Selain itu, terdapat tantangan dalam pemerataan distribusi belanja ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah tertinggal, yang dapat memengaruhi inklusivitas pertumbuhan. Efisiensi dan transparansi pelaksanaan anggaran juga menjadi kendala potensial yang bisa mengurangi dampak positif belanja pemerintah. Di samping itu, penting untuk memahami perbedaan dampak belanja dalam jangka pendek untuk pemulihan pasca-pandemi dan jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan, serta bagaimana faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan inflasi memengaruhi efektivitas kebijakan fiskal tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian sebagai berikut.

1. Apakah Pembiayaan Bank Syariah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?
2. Apakah Tingkat Pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?
3. Apakah Investasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?
4. Apakah Belanja Pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?
5. Apakah Pembiayaan Bank Syariah, Tingkat Pendidikan, Investasi, dan Belanja Pemerintah secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti Pembiayaan Bank Syariah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
2. Untuk meneliti Tingkat Pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
3. Untuk meneliti Investasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
4. Untuk meneliti Apakah Belanja Pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

5. Untuk meneliti Pembiayaan Bank Syariah, Tingkat Pendidikan, Investasi, dan Belanja Pemerintah secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

E. Kegunaan Penelitian

Mengacu dari tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah kegunaan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman serta penerapan teori pada kasus nyata, dengan fokus pada analisis pengaruh pembiayaan bank syariah, tingkat pendidikan, investasi, dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a). Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak pengelola perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah mengenai analisis pengaruh pembiayaan bank syariah, tingkat pendidikan, investasi, dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang penting dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ekonomi dan sektor keuangan syariah.

- b). Bagi Universitas

Penelitian bisa menjadi acuan, pedoman, pertimbangan, serta dijadikan bahan referensi yang relevan pada penelitian seterusnya.

F. Ruang Lingkup Penelitian dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini memerlukan ruang lingkup untuk membatasi ruang yang akan diteliti berdasarkan ruang lingkup yang ada. Ruang lingkup digunakan agar penelitian terarah dan efektif. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Tingkat Pendidikan, Investasi, Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.

2. Keterbatasan Penelitian

Masalah yang akan dikaji terbatas pada :

1. Data yang digunakan hanya di tahun 2019-2023
2. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik
3. Data yang digunakan diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan
4. Data yang digunakan diperoleh web resmi Kementrian Investasi dan BKPM
5. Data yang digunakan diperoleh melalui web APBN

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam skripsi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan makna terhadap istilah-istilah teknis dan konsep-konsep yang digunakan, sehingga pembaca memahami konteks penggunaannya secara tepat sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang dibahas.

1. Definisi Konseptial

a. Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan bank syariah merupakan penyediaan dana oleh bank syariah kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), jual beli (murabahah), atau sewa (ijarah), dengan menghindari unsur riba, maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). pembiayaan ini menekankan keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang saling menguntungkan antara bank dan nasaban.³¹

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah jenjang formal yang ditempuh individu, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi, yang mencerminkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.³²

c. Investasi

³¹ Mariya Ulpah, "Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020," *JURNAL Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2021): 147–60, file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf.

³² Asnidar, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia."

Investasi adalah penanaman modal (baik domestik maupun asing) dalam bentuk aset riil atau keuangan untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang dan mendorong produktivitas ekonomi.³³

d. Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah adalah pengeluaran anggaran negara/daerah untuk membiayai program pembangunan, pelayanan publik, dan operasional pemerintahan.³⁴

e. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara yang mencerminkan perkembangan kapasitas produksi dan kesejahteraan masyarakat.³⁵

2. Definisi Operasional

a. Pembiayaan Bank Syariah

Diukur melalui total nilai pembiayaan syariah (dalam miliar Rupiah) yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia selama periode tertentu. Data diperoleh dari laporan keuangan bank syariah yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikategorikan berdasarkan jenis akad (mudharabah, murabahah, dll.)

³³ Abubakar Nizar, Chairul, Hamzah and Sofyan Syahnur, "Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 1(2), no. 2302–0172 (2013): 8.

³⁴ Amrillah, M Irwan, and M Firmansyah, "Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Elastisitas Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5, no. 2 (2023): 8–19.

³⁵ Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*, Jurnal Ekonomi dan Studi Perkembangan, Vol. 9 No.1 (2018)

b. Tingkat Pendidikan

Diukur menggunakan rata-rata lama sekolah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Data diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS)

c. Investasi

Diukur melalui total nilai investasi yang tercatat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mencakup investasi langsung (FDI) dan investasi portofolio.

d. Belanja Pemerintah

Diukur melalui alokasi anggaran belanja daerah (APBD) untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Data diambil dari laporan realisasi APBD Kementerian Keuangan atau pemerintah daerah.

e. Pertumbuhan Ekonomi

Diukur melalui tingkat pertumbuhan PDB selama periode tertentu. Data bersumber dari laporan triwulanan atau tahunan BPS.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari : a) Latar Belakang, b) Identifikasi Masalah, c) Rumusan Masalah, d) Tujuan Penelitian, e) Manfaat Penelitian, f) Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian, g) Penegasan Istilah, dan h) Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini terdiri dari teori-teori yang mendukung sesuai pembahasan dari variabel pertama sampai variabel seterusnya, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas yang berhubungan dengan metode penelitian, yaitu : a) Pendekatan dan Jenis Penelitian, b) Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian, c) Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukuran, d) Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian, dan e) Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari : a) Penentuan Model Estimasi, b) Penentuan Metode Estimasi, c) Uji Asumsi Klasik, dan d) Uji Hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yang telah di peroleh. Bab ini diajukan untuk menjawab masalah yang diteliti dan menjelaskan hal yang telah ditemukan dalam penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada akhir bab terdiri dari :

a) Kesimpulan yaitu pernyataan dari hasil penelitian secara singkat dan tepat serta menunjukkan kebenaran dari hipotesis, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, dan b) Saran yang diungkapkan berdasarkan hasil penelitian.